

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

STEELYANA INDRIASARI dan WINARTI

Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro-Surakarta, 57136, Telp. 0271-857575

Abstract : Implementation of Principles of Financial Management. Implementation of good governance requires institutional and public management reform. There is a difference in the field of financial management reforms and financial management areas. The purpose of this study is to determine differences in the implementation of the principles in the areas of financial management in Karanganyar and Sukoharjo region. This study uses a quantitative method using a questionnaire as a data collection tool. The study population is all officials at Regional Secretariat, Department/ Agency/Office/Unit financial management area (PPKD, SKPDs) for echelon III, Council Budget Agency and associated stakeholders. The sampling technique using saturated sampling. Data were tested by using the validity and reliability by using Product Moment correlation and Cronbach 's alpha. Data analysis using a different test with different test techniques on average two independent samples (t-test). The results showed that different tests are performed using Independent Sample Test (Mann Whitney Test) and the Independent Sample t-Test, it turns out there is a difference in the implementation of the principles of financial management between Sukoharjo and Karanganyar region. Sukoharjo turned out better than Karanganyar in the implementation of 3 (three) areas of financial management principles, namely the principle of accountability, probability and control. The impact of differences in the implementation of the principle of local financial management, making Sukoharjo is able to achieve higher revenue and development expenditure than Karanganyar region.

Keywords : principles of financial management, good governance, implementation, institutional reforms.

Abstrak: Implementasi Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Namun reformasi di bidang manajemen keuangan daerah terdapat perbedaan pengelolaan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Populasi penelitian ini adalah seluruh pejabat Setda, Dinas/Badan /Kantor/ Unit pengelolaan keuangan daerah (PPKD, SKPD) dengan kriteria pejabat eselon III, Badan Anggaran Dewan dan *Stakeholders* terkait. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling jenuh*. Data yang diperoleh diuji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment* dan *cronbach's alpha*. Analisis data menggunakan uji beda dengan teknik uji beda rata-rata dua simple independent (t-test). Dari hasil uji beda yang dilakukan dengan menggunakan uji *Independent Sample Test (Mann Whitney Test)* dan uji *Independent Sample t-Test*, ternyata terdapat perbedaan dalam implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Sukoharjo lebih baik dari pada Kabupaten Karanganyar dalam implementasi tiga (3) prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu prinsip akuntabilitas, *probity* dan pengendalian. Dampak dari perbedaan implementasi prinsip pengelolaan keuangan daerah, menjadikan Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi realisasi pendapatan dan belanja pembangunan dari Kabupaten Karanganyar.

Kata kunci : prinsip pengelolaan keuangan, pemerintahan yang baik, penerapan, reformasi kelembagaan.

PENDAHULUAN

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah pada pos pendapatan asli daerah perlu dikaji karena merupakan sumber keuangan terbesar daerah guna meningkatkan kemandirian daerah (Halim A. 2001). Di era otonomi daerah saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber penerimaan utama daerah. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah adalah besarnya pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan sumber pendapatan lain dinilai terlalu berfluktuatif dan di luar kewenangan pemerintah. Kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Kajian pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar ternyata belum mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari angka-angka pembangunan yang tertuang pada kabupaten Sukoharjo dan kabupaten Karanganyar dalam angka. Kebijakan tata kelola keuangan daerah kabupaten Sukoharjo dan kabupaten Karanganyar masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kebijakan tata kelola keuangan daerah yang ideal.

Transparency international Indonesia (2012), telah menunjukkan perannya dalam program pemberantasan korupsi dan sangat berguna dalam mengontrol terhadap pemerintah guna memperbaiki sistem tata kelola keuangan negara maupun daerah, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan laporan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) kabupaten Sukoharjo, Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Perhitungan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 4,76 %, sedangkan Kabupaten Karanganyar hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,56 %, di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,71 % dan pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 5,5 prosen. Laporan Bank Indonesia tentang Kajian Ekonomi Regional (KER) di eks Keresidenan Surakarta pada tahun 2009, kabupaten Sukoharjo berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 356,75 miliar rupiah atau 51,42 % dari target yang ditetapkan. Realisasi ini meningkat 14,15 %, dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dana perimbangan masih memberikan kontribusi terbesar pada sumber pendapatan yaitu 90,73 %, dimana DAU masih memberikan peranan penting dengan prosentase sebesar 91,84 % dari total dana perimbangan. Dana perimbangan yang terealisasi sebesar 323,75 miliar rupiah atau mengalami peningkatan 14,51 prosen. PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing realisasi sebesar 21,98 miliar rupiah dan 11,11 miliar rupiah. Realisasi PAD mengalami penurunan 0,74 % sedangkan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami peningkatan 43,54 % dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kabupaten Karanganyar, tahun 2009 berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 369,25 miliar rupiah (51,34 %) dari target yang ditetapkan. Realisasi ini meningkat 5,25 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dana perimbangan masih memberikan kontribusi terbesar pada sumber pendapatan yaitu 90,26 % dimana DAU masih memberikan peranan penting dengan prosentase sebesar 90,61 % dari total dana perimbangan. Dana perimbangan yang terealisasi sebesar 333,27 miliar rupiah (mengalami peningkatan 18,98%). Untuk PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami penurunan 33,27 % dan 69,89 % dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kabupaten Sukoharjo, telah merealisasi belanja sebesar 300,99 miliar rupiah (mencapai 40,67 %) dari target yang ditetapkan. Belanja yang direalisasikan terdiri dari belanja tidak langsung 245,32 miliar rupiah dan belanja langsung 55,68 miliar rupiah yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 40,87 % dan 11,08 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam belanja tidak langsung terdapat peningkatan Belanja Pegawai 51,84 % atau terealisasi sebesar 233,10 miliar rupiah sebesar 30,65 miliar rupiah, mengalami penurunan 4,19 % sedangkan belanja modal terealisasi sebesar 15,66 miliar rupiah 92,11 % sedangkan belanja modal terealisasi sebesar 15,66 miliar rupiah, mengalami penurunan 4,19 % sedangkan belanja modal terealisasi sebesar 15,66 miliar rupiah meningkat 92,11 %.

Kabupaten Karanganyar telah merealisasi belanja sebesar 299,27 miliar rupiah atau mencapai 37,42 % dari target yang ditetapkan. Belanja yang direalisasikan terdiri dari belanja tidak langsung 275,51 miliar rupiah atau meningkat sebesar 15,88 % dan belanja langsung 27,88 miliar rupiah atau sebesar 15,10 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam belanja tidak langsung terdapat peningkatan belanja pegawai 12,36 % atau realisasi sebesar 247,26 miliar rupiah. Sedang pada pos belanja langsung pada komponen barang dan jasa terealisasi sebesar 18,44 miliar rupiah, mengalami peningkatan 1,29 % sedangkan belanja modal terealisasi sebesar 5,32 miliar rupiah menurun 22,97 %.

Dilihat dari realisasi pendapatan dan realisasi belanja pembangunan kedua Kabupaten, terdapat perbedaan yang berarti, dimana realisasi pendapatan di Kabupaten Sukoharjo meningkat lebih tinggi dari Kabupaten Karanganyar (14,15 % banding 5,25 %). Begitu pula realisasi belanja pembangunan lebih besar di Kabupaten Sukoharjo dari Kabupaten Karanganyar (40,67 % banding 37,42 %). Berdasarkan fakta di atas tersebut maka pertanyaan penelitian adalah apakah terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar serta apa dampaknya pada realisasi pendapatan dan biaya pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Wahyudi (2011), tujuan otonomi daerah yang dilaksanakannya dengan desentralisasi fiskal dibidang pengelolaan keuangan dapat dikatakan belum berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan khususnya didalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, namun harus diakui bahwa keberhasilan dari segi politik dapat dicapai dan sangat bermanfaat guna menjaga kestabilan dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Hal ini diperparah dengan masih lemahnya pelaksanaan manajemen keuangan daerah yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002).

Reformasi manajemen publik terkait dengan penggunaan model pemerintah baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, bukan hanya sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen. Perubahan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah meliputi lima prinsip yaitu: akuntabilitas, *value for money*, *probity* (kejujuran), transparansi dan pengendalian (Masdiasmo, 2002). Implementasi prinsip manajemen keuangan akan berdampak pada realisasi pendapatan dan biaya pembangunan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar serta dampaknya pada realisasi pendapatan dan biaya pembangunan daerah.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah uji komparatif yaitu menghitung perbedaan mean dari dua sampel independen (Pengujian-t). Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, lokasi ini dipilih berdasarkan justifikasi peneliti dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memberikan data yang sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan oleh peneliti. Sehingga hasil penelitian tidak secara otomatis dapat digunakan sebagai referensi daerah lain yang lebih luas. Populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Sekretariat daerah, Kepala dinas/Badan/Kantor tingkat kabupaten sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kriteria pejabat eselon III, anggota DPRD dengan kriteria anggota Badan Anggaran Dewan, dan *Stakeholders* terkait (LSM), penentuan dengan menggunakan metode *sampling jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel

Pengolahan data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah untuk mendapatkan skor total dari responden untuk pertanyaan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah sebagai variabel independen. Tahap kedua adalah melakukan uji beda dengan teknik uji beda rata-rata dua sampel independen (*t-test*) untuk membandingkan perbedaan antara dua kelompok sampel. Dalam penelitian ini uji beda statistik yang dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for Windows 13.0*. Untuk menguji hipotesa/H₁: Ada perbedaan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Dipakai rumus uji beda rata-rata (*t-test*) secara umum adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_p^2 (1/n_1 + 1/n_2)}}$$

Dengan

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1) S_1^2 + (n_2-1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Uji beda yang dilakukan dengan menggunakan uji *Independent Sample Test (Mann Whitney Test)* untuk variabel yang terdistribusi normal dan uji *Independent Sample t-Test* untuk variabel yang terdistribusi tidak normal.

HASIL

Dari hasil pengujian validitas terhadap 5 variabel prinsip pengelolaan keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni meliputi variabel akuntabilitas, *value for money*, *probity*, transparansi dan pengendalian, diketahui bahwa semua item pertanyaan

dari kelima variabel yang digunakan dalam kuisioner adalah valid kecuali item pertanyaan akuntabilitas yang memiliki nilai signifikansi pada nilai korelasi per item dengan total korelasi sebesar 0,657 yang berarti nilai signifikasinya adalah $> (\alpha) 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pada item pertanyaan tersebut tidak valid sehingga tidak dapat digunakan dalam penelitian karena item pertanyaan tersebut tidak dapat mengukur apa yang seharusnya bisa diukur oleh item pertanyaan tersebut mengenai kewajaran dalam laporan keuangan. Demi menjamin keaslian data yang telah diperoleh, maka item pertanyaan akuntabilitas harus di *out layer* atau di drop, sehingga item-item pertanyaan yang lain, yang terdapat dalam kuisioner tersebut dapat digunakan kembali untuk penelitian sejenis selanjutnya.

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur apakah instrument kuisioner yang digunakan untuk pengumpulan data yang merupakan indikator-indikator dari variabel akuntabilitas, *value for money*, *probity*, transparansi dan pengendalian telah handal atau reliable. Pada penelitian ini hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach alpha*. Indikator-indikator variabel tersebut dijabarkan dalam setiap item pertanyaan dalam kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian. Indikator tersebut dianggap reliable apabila nilai *cronbach alpha* $> 0,60$.

Berdasarkan hasil penghitungan, maka nilai *cronbach alpha* dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,769	Reliabel
Value For Money	0,619	Reliabel
Probity	0,766	Reliabel
Transparansi	0,755	Reliabel
Pengendalian	0,827	Reliabel

Sumber : Data olahan SPSS

Semua indikator dari variabel akuntabilitas, *value for money*, *probity*, transparansi dan pengendalian dalam Tabel 1 adalah handal atau reliable karena memiliki nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ sehingga indikator-indikator dalam variabel ini dapat dipergunakan lagi sebagai dasar untuk penelitian sejenis berikutnya. Pengujian normalitas, diuji dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*. Cara menguji normalitas yaitu dengan membandingkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang diperoleh dengan taraf signifikansi (α) 5% atau 0,05. Apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* $> \alpha$ maka data terdistribusi normal atau sebaliknya jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* $< \alpha$ maka data tidak terdistribusi dengan normal.

Berdasarkan hasil penghitungan, maka nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas

Variabel	Nilai <i>Asymp Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,000	Tidak Normal
Value For Money	0,211	Normal
Probity	0,009	Tidak Normal
Transparansi	0,245	Normal
Pengendalian	0,027	Tidak Normal

Sumber : Data olahan SPSS

Dari hasil pengujian normalitas pada Tabel 2 terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dari variabel akuntabilitas, *probity*, dan pengendalian adalah $< (\alpha) 5\%$ atau 0,05 artinya ketiga variabel tersebut tidak terdistribusi dengan normal, sedangkan pada variabel *value for money*, dan transparansi nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah $> (\alpha) 5\%$ atau 0,05 artinya bahwa data dari kedua variabel tersebut terdistribusi dengan normal. Selanjutnya uji beda untuk ketiga variabel yang tidak normal, digunakan uji *Independent Sample Test (Mann Whitney Test)*, dan untuk dua variabel yang terdistribusi normal digunakan uji *Independent Sample t – Test*.

Independent sampel t-test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok. Uji *Independent sampel t-test* merupakan uji statistik parametrik yang dilakukan pada sampel yang terdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal pengujian dilakukan dengan uji *independent sampel test (Mann Whitney Test)* yang merupakan uji statistik nonparametrik, dimana persyaratannya lebih longgar yaitu tidak berdasar distribusi sampel sehingga uji ini juga sering disebut uji bebas distribusi.

Hasil uji beda dengan menggunakan uji *independent sampel t-test* dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian Independen Sampel t-test (2 Variabel)

Variabel	Mean		Levene's Test		t-test	
	Kab. Sukoharjo	Kab Karanganyar	F hitung	Sign	t hitung	Sign
Value For Money	34,3889	32,0938	2,234	0,137	4,587	0,000
Transparansi	24,3333	22,5781	0,179	0,673	2,685	0,008

Sumber : Data olahan SPSS

Uji beda rata-rata variabel *value for money* dan transparansi antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, nilai *Sig (2-tailed)* pada nilai *t – test for equality of means* pada variabel *value for money* menunjukkan nilai sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai signifikannya adalah $< (\alpha) 5\%$ atau 0,05 artinya terdapat perbedaan di dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam kebijakan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Pada variabel *value for money*, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai mean sebesar 34,3889 dan Kabupaten Karanganyar sebesar 32,0938 dan pada variabel transparansi memiliki mean 24,333 dan 22,5781. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dari variabel *value for money* dan transparansi di dua Kabupaten tidak menunjukkan perbedaan signifikan (Tabel 3).

Uji beda untuk tiga variabel yaitu variabel akuntabilitas, *probity*, dan pengendalian yang tidak normal, menggunakan uji *Independent Sample Test (Mann Whitney Test)*. Hasil uji beda dengan menggunakan uji *independent sampel test* yang dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Independen Sampel Test (3 Variabel)

Variabel	Mean		Mann Whitney Test
	Kab. Sukoharjo	Kab Karanganyar	Asymp. Sign
Akuntabilitas	94,87	38,84	0,000
Probity	87,71	46,89	0,000
Pengendalian	84,09	50,96	0,000

Sumber : Data olahan SPSS

Dari angka rata-rata 3 variabel implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah pada Tabel 4 ternyata Kabupaten Sukoharjo mempunyai angka rata-rata jauh lebih tinggi dari Kabupaten Karanganyar dan akan berdampak pada realisasi pendapatan dan belanja pembangunan daerah.

PEMBAHASAN

Value For Money

Hasil perbedaan dalam implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar yang berhubungan dengan variabel *value for money* dapat ditelusuri dari aspek pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2009, di Kabupaten Sukoharjo angka pertumbuhan ekonomi daerah bisa mencapai angka 4,76 persen sedangkan di Kabupaten Karanganyar hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,56 persen dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 4,71 persen dan pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu sebesar 5,5 persen. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2009 atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Sukoharjo sebesar 8.920.761,89 juta rupiah dan PDRB atas dasar harga konstan 4.756.902,50 juta rupiah dan Kabupaten Karanganyar, produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2009 atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 8.378.315,88 juta rupiah, naik dua kali lipat bila dibandingkan pada PDRB tahun 2006 atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 6.224.781,84 juta rupiah dan *income* per kapita 6.484.767,75 juta rupiah. Dan PDRB atas dasar harga konstan 4.401.301,74 juta rupiah dan *income* per kapita 4.561.426,52 juta rupiah.

Besar kecilnya pendapatan daerah mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Semakin besar pendapatan asli daerah suatu daerah bisa berarti semakin mandiri daerah tersebut serta mampu melaksanakan otonomi daerah.

PAD di Kabupaten Sukoharjo di tahun 2009 sebesar 48.842.528 ribu rupiah. Sedangkan untuk realisasi pajak daerah, pada tahun 2009 sebesar 18.003.313 ribu rupiah, dan PAD di Kabupaten Karanganyar di tahun 2009 sebesar 66.604.710 ribu rupiah. Sedangkan untuk realisasi pajak daerah, tahun 2007 sebesar 19.053.559 ribu rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi 21.856.746 ribu rupiah.

Prinsip ekonomis, efektif dan efisien dari implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat melalui besarnya data realisasi anggaran yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2009, Kabupaten Sukoharjo berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 356,84 miliar rupiah atau 51,42 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi belanja sebesar 300,99 miliar rupiah atau mencapai 40,67 persen dari target yang ditetapkan.

Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2009 telah berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 369,25 miliar rupiah atau 51,34 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi ini meningkat 5,25 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dan realisasi belanja di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2009 sebesar 299,27 miliar rupiah atau mencapai 37,42 persen dari target yang ditetapkan.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo, lebih berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) dalam berbagai unsur penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten bila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dari kedua Kabupaten tersebut berdampak pada disparitas hasil pembangunan. Untuk mengukur disparitas hasil pembangunan, Irdam Ahmad (2011) dalam penelitiannya di empat Kabupaten di Provinsi Yogyakarta, dalam menentukan disparitas hasil pembangunan menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial. Dengan kedua pendekatan itu dapat diukur peringkat kriteria hasil pembangunan Kabupaten dan Kota.

Jadi implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pembangunan daerah tidak cukup hanya dengan pendekatan ekonomi, tetapi juga dengan pendekatan sosial yang meliputi angka melek huruf, angka harapan hidup, tingkat partisipasi angkatan kerja, partisipasi sekolah dan rumah tangga pelanggan listrik. Dengan kedua pendekatan itu, maka dapat diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari pada pembangunan daerah.

Transparansi

Pada variabel transparansi, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai mean sebesar 24,3333 dan Kabupaten Karanganyar sebesar 22,5781. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sukoharjo lebih transparan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat dibanding dengan Kabupaten Karanganyar.

Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan saja, namun juga keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang meliputi 5 (lima) hal yaitu keterbukaan dalam hal rapat, keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register, dan keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat (Tangke, 2004).

Transparansi yang sudah dilakukan di Kabupaten Sukoharjo maupun Kabupaten Karanganyar meliputi: (1) keterbukaan informasi adalah berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, seperti informasi mengenai pelelangan untuk pengadaan barang atau jasa di kabupaten, penerimaan pegawai negeri sipil, publikasi APBD kepada masyarakat dan publikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada masyarakat. (2) keterbukaan prosedur adalah berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana. Keterbukaan prosedur ini

merupakan tindak pemerintahan yang bersifat publik. Misalnya, keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun Kabupaten Karanganyar terkait rencana pembebasan tanah, rencana pembangunan mall atau rencana tata ruang. (3) keterbukaan menerima peran serta masyarakat adalah terjadi bila tersedia suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah; adanya kesempatan masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana; dan adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Peran serta merupakan hak untuk ikut memutuskan. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif. Peran serta ini dapat berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rencana pemerintah, dengar pendapat dengan pemerintah, dan lain-lain. Di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, keterbukaan menerima peran serta masyarakat terlihat pada saat proses musrenbang, baik dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai mean sebesar 94,87 dan Kabupaten Karanganyar sebesar 38,84. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sukoharjo, lebih akuntabel bila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar dalam berbagai unsur penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Kabupaten Sukoharjo lebih tepat waktu dalam proses penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), dari pada Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo juga lebih tertib dalam penyusunan laporan keuangan dibandingkan Kabupaten Karanganyar. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat dibanding Kabupaten Karanganyar. Hal ini terlihat dengan adanya publikasi APBD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) kepada masyarakat. Rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar disebabkan kurangnya informasi laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sampai pada masyarakat, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengotrol realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja pembangunan daerah. Hal yang sama juga ditemukan oleh Erna (2008) dalam penelitiannya tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan di sekretariat daerah Kabupaten Pelalawan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kontrol sosial diantara berbagai komponen masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah, terutama lembaga legislatif dan eksekutif. Sikap tidak transparansi dari kedua lembaga ini dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Yesi Mutia Basri (2008) dan Wahyudi (2011), dapat menimbulkan berbagai kejahatan korupsi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk melengkapi kurangnya informasi dalam anggaran pendapatan negara menurut Rutiana dan Sri (2013) gunakanlah informasi dan komunikasi teknologi dan forum akuntabilitas sosial. Dengan mengembangkan sistem informasi tersebut maka masyarakat desa dan kelurahan dapat mengakses informasi tentang penggunaan anggaran pendapatan dan belanja pembangunan daerah. Akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat menurut Teguh Kurniawan (2009), merupakan instrumen yang dianggap mampu mengatasi tindak pidana korupsi baik yang terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor yang bersifat langsung dan

tidak langsung maupun akibat dari faktor-faktor yang berasal dari karakteristik individu dan struktural.

Probity

Pada variabel *probity*, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai mean sebesar 87,71 dan Kabupaten Karanganyar sebesar 46,89. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sukoharjo, jauh lebih jujur dalam mengelola keuangan publik bila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten. Selain itu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar maka Kabupaten Sukoharjo lebih menegakkan *rule of law* yaitu kerangka hukum yang berlaku dengan adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang diberikan dalam mengelola keuangan di daerah.

Pengendalian

Pada variabel pengendalian, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai mean sebesar 84,09 dan Kabupaten Karanganyar sebesar 50,96. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sukoharjo, lebih bisa melakukan pengendalian bila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dalam proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan laporan dari Bank Indonesia tentang Kajian Ekonomi Regional (KER) Eks Keresidenan Surakarta pada tahun 2009, dimana Kabupaten Sukoharjo berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 356,84 miliar rupiah atau 51,42 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi ini meningkat 14,15 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2009 berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 369,25 miliar rupiah atau 51,34 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi ini meningkat 5,25 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan di Kabupaten Karanganyar, dana perimbangan masih memberi kontribusi terbesar pada sumber pendapatan yaitu 90,73 persen dimana DAU masih memberikan peranan penting dengan prosentase sebesar 91,84 persen dari total dana perimbangan. Dana perimbangan yang terealisasi sebesar 323,75 miliar rupiah atau mengalami peningkatan 14,51 persen. Untuk PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing terealisasi sebesar 21,98 miliar rupiah dan 11,11 miliar rupiah. Realisasi PAD mengalami penurunan 0,74 persen sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan 43,54 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dana perimbangan juga masih memberi kontribusi terbesar pada sumber pendapatan yaitu 90,26 persen dimana DAU masih memberikan peranan penting dengan prosentase sebesar 90,61 persen dari total dana perimbangan. Dana perimbangan yang terealisasi sebesar 333,27 miliar rupiah atau mengalami peningkatan 18,98 persen. Untuk PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing terealisasi sebesar 26,75 miliar rupiah dan 9,22 miliar rupiah. Realisasi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan 33,27 persen dan 69,89 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi belanja pada tahun 2009, Kabupaten Sukoharjo telah merealisasikan belanja sebesar 300,99 miliar rupiah atau mencapai 40,67 persen dari target yang ditetapkan. Belanja

yang direalisasikan terdiri dari belanja tidak langsung 245,32 miliar rupiah dan belanja langsung 55,68 miliar rupiah yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 40,87 persen dan 11,08 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam belanja tidak langsung terdapat peningkatan belanja pegawai 51,84 persen atau terealisasi sebesar 233,10 miliar rupiah. Sedangkan pada pos belanja langsung pada komponen barang dan jasa terealisasi sebesar 30,65 miliar rupiah, mengalami penurunan 4,19 persen sedangkan belanja modal terealisasi sebesar 15,66 miliar rupiah meningkat 92,11 persen.

Kabupaten Karanganyar pada tahun yang sama (2009) telah merealisasikan belanja sebesar 299,27 miliar rupiah atau mencapai 37,42 persen dari target yang ditetapkan. Belanja yang direalisasikan terdiri dari belanja tidak langsung 275,51 miliar rupiah atau meningkat sebesar 15,88 persen dan belanja langsung 27,88 miliar rupiah atau turun sebesar 15,10 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam belanja tidak langsung terdapat peningkatan belanja pegawai 12,36 persen atau terealisasi sebesar 247,26 miliar rupiah. Sedangkan pada pos belanja langsung pada komponen barang dan jasa terealisasi sebesar 18,44 miliar rupiah, mengalami peningkatan 1,29 persen sedangkan belanja modal terealisasi sebesar 5,32 miliar rupiah menurun 22,97 persen.

Dari kelima variabel prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, ternyata perbedaan implementasi prinsip pengelolaan daerah yang dominan adalah pada variabel akuntabilitas, *probty* dan pengendalian, karena dalam pengelolaan keuangan daerah masalah pertanggungjawaban, kejujuran dan pengendalian atau pengawasan adalah penting diperhatikan. Besarnya pendapatan daerah dan dana bantuan yang diterima dari berbagai sumber, jika tidak dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, maka hasil pembangunan daerah tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Hal yang sama juga ditemukan oleh Paulus (2011) dalam penelitiannya tentang akuntabilitas administrasi keuangan program alokasi dana desa (ADD), ternyata akuntabilitas administrasi keuangan alokasi dana desa (ADD) baik vertikal maupun horizontal menemui kegagalan. Kegagalan akuntabilitas tersebut disebabkan rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa. Jadi efektifitas implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan karakteristik sumber daya manusia yang mengelolanya dan kontrol dari masyarakat terhadap kinerja lembaga yang terkait dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja pembangunan daerah.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, diantara kedua kabupaten yang diteliti yaitu kabupaten Karanganyar dan kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan di daerah masing-masing, namun, terdapat perbedaan dalam penerapan (implementasi) dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dari dua Kabupaten terletak pada implementasi prinsip akuntabilitas, *probity* dan pengendalian atau pengawasan. Implementasi dari ketiga prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut lebih baik di Kabupaten Sukoharjo dari Kabupaten Karanganyar. Dampak dari implementasi prinsip pengelolaan keuangan ini, menjadikan Kabupaten Sukoharjo lebih berhasil merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja pembangunan daerah dari Kabupaten Karanganyar. Kekuatan ataupun kelemahan dari implementasi prinsip pengelolaan

keuangan ditentukan oleh tingkat kemampuan aparat pemerintahannya dan kontrol dari masyarakat. Kontrol dari masyarakat akan lebih efektif apabila didukung oleh sistem informasi penganggaran keuangan yang dapat diakses secara luas di kalangan masyarakat, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke desa dan kelurahan. Pengembangan sistem informasi demikian dapat mengatasi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja pembangunan daerah dalam tindakan pidana korupsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Erna Liza Afia, 2008. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal JIANA*, 8 (1).
- Irdam Ahmad, 2011. Disparitas Hasil Pembangunan Kabupaten dan Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Jurnal JIANA*, 11 (2).
- Halim, A. dan Theresia Damayanti, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. STIE YKPN Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Nayra, 2008. *Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sukoharjo*. <http://gunungmakalahblogspot.com>.
- Paulus Israwan Setyoko, 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal JIANA*, 11 (1).
- Rutiana Dewi Wahyuningsih dan Sri Astjarjo, 2013. Challenges in Implementation of ICT for Budget Information Literacy, *Jurnal Bisnis & Birokrasi*, 20 (1).
- Transparency International, 2012. Corruptions perceptions index, laporan survey Tahun 2012 www.ti.or.id, (diakses pada tanggal 5 April 2013).
- Tangke, P.M. 2004, *Transparansi Mewujudkan Good Governance*, 5 hlm, 23 Oktober 2010, pk 22.13. <http://paulusmtangke.wordpress.com>.
- Teguh Kurniawan, 2009. Peran Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan: Perspektif Teoritis. *Jurnal Bisnis & Birokrasi*, 16 (2).
- Yesi Mutia Basri, 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal JIANA*, 8 (1).
- Wahyudi Kumorotomo, 2011. Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja dan SILVA dalam APBD di Beberapa Daerah. *Jurnal JIANA* 11 (1).